**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pendidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sistem pendidikan nasional berupaya menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Keinginan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilannya sebagai bekal untuk dapat hidup lebih layak dimiliki oleh setiap manusia. Tuntutan akan pemenuhan hak dasar manusia tersebut tidak dapat di tawar-tawar lagi, karena disadari, hanya dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam era globalisasi ini. Namun kenyataan yang terdapat di Indonesia sekarang ini angka putus sekolah masih tinggi, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya tingginya biaya pendidikan dan keterbatasan ekonomi orangtua. Tingginya angka putus sekolah di Indonesia didukung oleh pemaparan dari Mendikbud melalui kompasiana.com yang menyatakan bahwa:

1

“Pada tahun 2007, dari 100 persen anak-anak yang masuk SD, yang melanjutkan sekolah hingga lulus hanya 80 persennya, sedangkan 20 persen lainnya harus putus sekolah. Dari 80 persen siswa SD yang lulus sekolah, hanya 61 persennya yang melanjutkan sekolah ke jenjang SMP sekolah yang setingkat lainnya. Kemudian setelah itu hanya 48 persen yang akhirnya lulus sekolah. Sementara itu, 48 persen yang lulus dari jenjang SMP hanya 21 persennya saja yang melanjutkan ke jenjang SMA. Sedangkan yang bisa lulus jenjang SMA hanya sekitar 10 persen. Persentase ini menurun drastis dimana jumlah anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tinggal 1,4 persen saja’. (<http://edukasi.kompasiana.com>).

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia, telah diperkenalkan mulai tahun 1990. Pendidikan kesetaraan pada hakekatnya merupakan program pelayanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dan informal, bertujuan untuk memberikan pelayanan setara SD, SMP, SMA atau yang sederajat kepada warga masyarakat karena sesuatu hal kebutuhan pendidikannya tidak mungkin ditempuh melalui jalur pendidikan formal atau mereka yang sadar memilih menempuh jalur pendidikan non formal dan informal untuk menuntaskan pendidikannya.

Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Namun pada kenyataanya masih terdapat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian dari Tri Joko Raharjo dan Tri Suminar yang berjudul Studi Peran Pendidikan Nonformal dalam Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun di Kota Semarang pada Tahun 2005 mengenai Penerapan pedagogi dan andragogi dalam pembelajaran pendidikan kesetaraan kelompok belajar paket A, B dan C yang menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan dalam diri sebagian warga belajar yang malas-malasan untuk datang belajar dan sebagainya.

Pendidikan kesetaraan diselenggarakan pada tiap kabupaten di Indonesia bahkan hampir tiap kecamatan tanpa terkecuali di kecamatan Maritengngae yang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Sidenreng Rappang. Data menunjukan masih banyaknya angka putus sekolah di Kabupaten Sidrap yang diakibatkan dari berbagai faktor.

Kondisi geografis dan jumlah penduduk yang terus meningkat di kabupaten ini, membuat pemerintah setempat tidak berhenti berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakatnya, salah satunya yaitu dengan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

Pendidikan kesetaraan sendiri sudah terselenggara selama 16 tahun di kabupaten Sidrap, tepatnya berdiri pertamakali pada tahun 2000 di UPT SKB Kabupaten Sidrap. SKB Sidrap adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pendidikan nonformal yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten Sidrap. Sebagai sanggar kegiatan belajar, SKB memfasilitasi dan melayani berbagai kegiatan program pendidikan nonformal, termasuk didalamnya adalah program pendidikan kesetaraan paket C. UPT SKB Sidrap sendiri berdiri sejak tahun 1978. Sampai saat ini UPT SKB Sidrap sudah meluluskan kurang lebih 560 warga belajar pendidikan kesetaraan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti (2014) peneliti menyaksikan proses pembelajaran secara langsung sehingga peneliti mengangkat penelitian ini guna memperoleh data yang sebenarnya tentang penyelenggaraan paket C, namun pada saat pelaksanaan penelitian peneliti tidak meneliti secara langsung pada proses pembelajaran warga belajar disebabkan karena belum dimulainya proses pembelajaran sehingga peneliti hanya melakukan proses wawancara secara langsung dengan pihak pengelola dan beberapa orang tutornya saja. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C di SKB Sidrap juga menjadi patokan bagi seluruh PKBM di Kabupaten Sidrap yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paket C. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan paket C yang diselenggarakan di SKB Sidrap harus sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendididkan kesetaraan paket C yang diberlakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan harus diiringi dengan kinerja yang baik dari pihak pengelola, tutor dan warga belajarnya, agar program pendidikan kesetaraan paket C ini dapat menyetarai sekolah Formal (SMA) dan kinerja tutornya pun harus yang betul-betul berkompeten guna mencapai visi dan misi negara dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional. Sebagai salah satu jenis pendidikan non formal, pendidikan kesetaraan harus lebih mandiri dalam proses penyelenggaraanya. Di SKB Sidrap sendiri penyelenggaraan pendidikan kesetaraan masih memiliki berbagai masalah, salah satu diantaranya adalah masalah warga belajar. Warga Belajar kurang termotivasi dalam pelaksanaan pendidikan paket C mereka seperti hanya ingin memperoleh ijazah saja tanpa melalui proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada saat proses Belajar mengajar berlangsung, hanya sedikit dari warga belajar yang hadir.

Presensi warga belajar pendidikan kesetaraan paket C menunjukan ada 20 orang pada setiap kelompok belajar, namun yang hadir tidak kurang dari 10 orang yaitu sekitar 50% dari jumlah kelompok belajar. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pengelola untuk segera mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Selain permasalahan warga belajar, permasalahan lain juga adalah adanya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C yang jenisnya adalah Swadaya yang pelaksanaannya hanya berlangsung selama 6 bulan. Penyebabnya dikarenakan warga belajar yang ingin memperoleh ijazah tanpa proses pembelajaran tersebut yang menanggung seluruh beban biaya dan ini menjadi pemicu pihak penyelenggara terpengaruh untuk mengadakan penyelenggaraan paket C ini, melihat banyaknya masyarakat yang ingin memperoleh ijazah dan tidak adanya bantuan pendanaan dari pihak pemerintah untuk program ini. Oleh sebab itu, program yang seharusnya dilaksanakan selama 3 tahun dikerucutkan menjadi 6 bulan saja dan program ini sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya di SKB Sidrap.

Peneliti memilih tempat penelitian di SKB Sidrap, hal ini dikarenakan adanya permasalahan tersebut yang muncul sehingga dapat mempengaruhi proses penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C di dalam lembaga tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C di SKB Sidrap Kabupaten Sidrap.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket C di SKB Sidrap Kabupaten Sidrap?
2. Apa saja kendala yang timbul pada penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket C di SKB Kabupaten Sidrap?
3. **Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini secara umum ingin memperoleh gambaran tentang:

1. Penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket C di SKB Sidrap Kabupaten Sidrap
2. Kendala apa yang di timbulkan pada pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket C di SKB Kabupaten Sidrap
3. **Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
2. Dapat menjadi bahan informasi bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Luar sekolah (PLS) Fakultas ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar dalam mengembangkan Pendidikan Kesetaraan Paket C.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan dalam melakukan penelitian yang relevan.
4. Manfaat Praktis
5. Memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia melalui program Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket C.
6. Memberi informasi dan masukan bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan Pendidikan Kesetaraan Paket C.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS**

1. **TINJAUAN PUSTAKA**

Pengkajian pustaka sebagai landasan teoritis dalam metodologi penelitian kualitatif study kasus ini dijelaskan beberapa variabel yang terkait dengan topik penelitian terdiri atas Penyelenggara Program, Program Paket C, Penyelenggaraan Program Paket C, Kendala-kendala, Kerangka Pikir dan Hipotesa.

1. **Penyelenggara Program**

Menurut Dirjen PLS, Depdiknas (2003:20) bahwa “dalam pelaksanaan kegiatan kejar paket C perlu penyelenggara program yang akan melaksanakan seluruh program dalam penyelenggaraan program ini”. Penyelenggara program ini merupakan tenaga yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan program mula tahap perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi program dan tindak lanjut. Penyelenggara program adalah lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau dunia usaha, yang secara terencana dan bertanggung jawab menyelenggarakan program paket C. Penyelenggara program paket C diberikan kepada seluruh petugas yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan program, khususnya ditujukan kepada penyelenggara program paket C di lapangan sehingga yang dapat menyelenggarakan program secara prioritas adalah Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) atau Sanggar kegiatan belajar (SKB), lembaga kursus, LSM, dan Pondok Pesantren. Apabila lembaga-lembaga tersebut tidak ada, program dapat diselenggarakan oleh; Yayasan, Badan Hukum, dan Badan Usaha serta Organisasi kemasyarakatan, social dan profesi.

8

Dalam penyelenggara program  PLS sendiri yang terdapat di masyarakat menurut Umbirtu Sihombing (1999:20) dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu: (a) Program pokok, merupakan program PLS yang diadakan oleh pemerintah terdiri dari program pemberantasan buta aksara dan pendidikan dasar, masing-masing program ini terdiri dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), kejar paket A setara dengan SD (Sekolah Dasar), paket B setara dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan paket C setara dengan SMA (Sekolah Menengah Atas). Dan (b) Program penunjang, merupakan program melalui kegiatan rintisan-rintisan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebutuhan masyarakat, yaitu seperti program pemberdayaan ekonomi desa, program kursus masuk desa, penyediaan dan pengembangan sarana belajar pokok dan pelengkap, antara lain melalui latihan ketenagaan, bantuan teknis, serta monitring dan evaluasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Penyelenggara program adalah lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau dunia usaha, yang secara terencana dan bertanggung jawab menyelenggarakan program kesetaraan. Penyelenggara program paket C di lapangan yang dapat menyelenggarakan program secara prioritas adalah Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) atau Sanggar kegiatan belajar (SKB), lembaga kursus, LSM, da Pondok Pesantren.

1. **Program Paket C**

Dalam sub bahasan akan mengkaji beberapa variable yang terkait dengan pembahasan yaitu “pengertian program paket C, pendidikan kesetaran program paket C dan tujuan program kesetaraan” selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

* 1. **Pengertian Program Paket C**

Pengetian Pendidikan Kesetaraan Paket C Program pendidikan kesetaraan melingkupi program kelompok belajar paket A setara SD/MI, kelompok belajar paket B setara SMP/MTs dan kelompok belajar paket C setara SMA/MA. Kelompok belajar paket C setara SMA/MA merupakan program baru dilingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, karena program ini baru berkembang sekitar tahun 2003. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya UU Sisdiknas No.20/2003.

Pendidikan kesetaraan menurut Mustofa Kamil (2011: 97) adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, dan majlis ta’lim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Dirjen PNFI (2010:7) menjelaskan tentang pengertian Program Paket C Umum merupakan pendidikan nonformal setara SMA atau sederajat, dengan penekanan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Program pendidikan kesetaraan paket C merupakan program rintisan yang dikembangkan Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, program kesetaraan paket C berada dibawah binaan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah. Sebagai sebuah program rintisan belum banyak PKBM atau SKB yang mengembangkan program ini. Acuan pelaksanaan pendidikan kesetaraan program paket A, B, dan C (2004: 4) menyebutkan bahwa tujuan pendidikan kesetaraan adalah:

* 1. Memfasilitasi pendidikan bagi kelompok masyarakat yang karena keterbatasan social, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografi, tidak dapat bersekolah pada usia sekolah.
	2. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengelola sumber daya yang ada dilingkungannya untuk meningkatkan taraf hidupnya.
	3. Memberikan kesetaraan akademik: paket A setara dengan SD, Paket B setara dengan SMP, dan Paket C setara dengan SMA, yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan belajar ataupun untuk melamar pekerjaan.

Sasaran program paket C adalah masyarakat lulusan paket B, siswa-siswa lulusan SMP/MTs, serta masyarakat yang telah mengikuti pendidikan informal yang disetarakan. Begitu pula masyarakat yang putus sekolah (drop out) SMA/MA.

Jadi dapat dsimpulkan bahwa agar supaya penyelenggaraan program kesetaraan paket C berjalan, maka proses penyelenggaraan ditelusuri dalam 10 patokan Pendidikan Luar Sekolah berikut ini agar menjadi menjadi tolok ukur. Anwas Iskandar (2009) Apabila kita perhatikan apa dan bagaimana kejadian pembelajaran melalui jalur pendidikan luar sekolah, akan jelas kita lihat ada 10 unsur (patokan) yang akan selalu ada pada setiap program. Kesepuluh patokan tersebut adalah : warga belajar, sumber belajar, pamong belajar, sarana belajar, tempat belajar, dana belajar, rajin belajar, kelompok belajar, program belajar dan hasil belajar. Kesepuluh unsur tersebut di satu sisi menjadi bagian yang mendukung program pembelajaran namun di sisi lain dapat digunakan menjadi dasar untuk menentukan patokan, ukuran atau standard penilaian untuk melihat sejauh mana pembelajaran mencapai tujuan yang diinginkan.

1. Warga belajar adalah anggota masyarakat yang ikut dalam satu kegiatan pembelajaran. Tidak digunakan istilah peserta didik murid, siswa, karena istilah ini memiliki konotasi bahwa anggota masyarakat tersebut sebatas penerima tidak menjadi pemilik dan penentu, kurang kelihatan aspek keterlibatan; sedang dalam kegiatan PLS, warga belajar turut aktif menentukan apa yang diinginkannya untuk dipelajari. Istilah warga menunjukkan bahwa anggota masyarakat tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.
2. Sumber belajar adalah warga masyarakat yang memiliki kelebihan baik di bidang pengetahuan, keterampilan, sikap dan mampu serta mau mengalihkan apa yang dimilikinya pada warga belajar melalui proses pembelajaran. Sumber belajar adalah orang yang merasa bertanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan manusia yang ada di lingkungannya. Mereka adalah manusia yang tidak masa bodoh dengan kebodohan. Sumber belajar bukan hanya mereka yang memiliki ijazah pada tingkat pendidikan sekolah tertentu, mereka yang tidak sekolah sekalipun, tetapi memiliki keunggulan dan mau membagi keunggulan tersebut pada orang lain dapat menjadi sumber belajar. Sumber belajar disebut juga dengan panggilan tutor, narasumber teknis.
3. Pamong belajar adalah tokoh masyarakat yang mampu dan mau membina, membimbing, mengarahkan dan mengorganisir program pembelajaran masyarakat di sekitarnya. Pamong belajar yang akan menjamin terjadinya proses pembelajaran bagi warga belajar rang telah memutuskan untuk ikut pada program tertentu. Pamong belajar bertempat tinggal di sekitar warga belajar sehingga mereka mudah berkomunikasi dan saling mendukung; Pamong belajar bukan petugas struktural pemerintahan, tetapi petugas yang diterima oleh warga belajar sebagai pembimbing mereka.
4. Sarana belajar adalah bahan dan alat yang ada di lingkungan masyarakat, yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sarana belajar dalam wujudnya dapat berbentuk buku, lembaran, bangunan, kekayaan alam, hewan, tumbuhan dan apa saja yang apabila dipelajari dapat menambah, meningkatkan wawasan dan pengetahuan warga belajar.
5. Tempat belajar adalah tempat di mana dimungkinkan terjadi proses pembelajaran; Dapat berwujud rumah, tempat pertemuan, tempat beribadah, balai desa, atau bangunan yang tidak digunakan lagi namun masih memungkinkan digunakan. Pembelajaran dapat terjadi dimana saja, sepanjang warga belajar, sumber belajar dan pamong belajar menganggap tempat itu sesuai untuk mendukung pencapaian hasil belajar yang diinginkan. Tempat belajar juga dapat berbentuk lapangan, tempat bersejarah. Karena itulah dikatakan bahwa PLS tidak menuntut gedung, tetapi kesempatan untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran.
6. Dana belajar adalah uang atau materi lainnya yang dapat diuangkan dalam menunjang pelaksanaan program pembelajaran yang telah disusun oleh pamong belajar bersama sumber belajar dan warga belajar. Dana belajar dapat bersumber dari pemerintah, tokoh masyarakat, pengusaha di lingkungan dimana warga belajar tinggal, maupun yang bersumber dari warga belajar sendiri ataupun dari warga masyarakat secara umum.
7. Ragi belajar adalah rangsangan yang mampu membangkitkan semangat belajar warga belajar, sehingga proses pembelajaran terjadi; Terjadi tanpa paksaan, gertakan tetapi karena kesadaran warga belajar serta kekuatan sang ada pada ragi belajar itu sendiri. Ragi belajar merupakan kekuatan yang dahsyat baik yang bersumber dari luar diri warga belajar maupun yang sebenarnya ada dalam diri warga belajar yang menyebabkan warga belajar menjadi senang, gembira dan gigih untuk terus belajar. Ragi inilah yang menyebabkan proses pembelajaran terus berjalan sampai tujuan tercapai.
8. Kelompok belajar adalah sejumlah warga belajar yang terdiri dari 5-10 orang, yang berkumpul dalam satu kelompok, memiliki tujuan dan kebutuhan belajar yang sama, dan bersepakat untuk saling membelajarkan. Kelompok inilah bersama sumber belajar dan pamong belajar yang menentukan tempat dan waktu belajar. Kelompok belajar adalah organ yang dinamis dan partisipatif.
9. Program belajar adalah serangkaian kegiatan yang mencerminkan tujuan, isi pembelajaran, cara pembelajaran, waktu pembelajaran, atau sering disebut dengan garis besar kegiatan belajar. Program belajar disusun berdasarkan kebutuhan warga belajar. Sehingga warga belajar menjadi pemilik dari program tersebut. Program pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga belajar akan menyebabkan warga belajar jenuh dan meninggalkan program. Program belajar tidak diatur, dipaksakan oleh orang lain, tetapi tumbuh dari keinginan dan kebutuhan warga belajar. Untuk menjamin mutu setiap program disusun acuan terendah yang harus dicapai setelah menyelesaikan program.
10. Hasil belajar adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dikuasai warga belajar setelah proses pembelajaran tertentu dilalui dalam kurun waktu tertentu. Kebermaknaan hasil belajar bagi peningkatan mutu hidup dan kehidupan warga belajar menjadi patokan keberhasilan. Hasil belajar yang segera dapat memperbaiki kehidupan warga belajar, merupakan ragi belajar untuk proses lebih lanjut. Belajar hanya untuk tahu akan kurang bermakna bagi warga belajar.

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa 10 patokan pendidikan luar sekolah adalah Warga belajar (warga masyarakat yang mempunyai kemampuan belajar dan yang telah tergerak hatinya untuk memulai belajar), Ragi belajar (zat yang dapat menimbulkan proses belajar spontan), Sarana belajar (kelengkapan mutlak yang diperlukan agar ragi belajar dapat berproses), Sumber belajar (warga masyarakat yang memiliki pkb, yang bersedia dipelajari, digurui dan dimagangi oleh siapa saja yang memerlukan), Kelompok belajar (para warga belajar yang menghimpun diri dalam kelompok karena ingin belajar), Pamong belajar (warga masyarakat yang ingin meningkatkan taraf pendidikan sesamanya melalui proses belajar), Tempat belajar (tempat yang memenuhi persyaratan belajar agar dapat menampung kegiatan belajar warga belajar), Dana belajar (barang, uang atau jasa dalam menjalankan proses belajar dan bermanfaat bagi warga belajar), Program belajar (serangkaian usaha yang disusun bersama dalam membantu proses belajar dan mengajar warga belajar), dan Hasil belajar (buah yang dipetik dari hasil balajar dan dinikmati bersama warga belajar).

* 1. **Pendidikan Kesetaraan Paket C**

Menurut Suryadi (2007:87) Pendidikan kesetaraan adalah “Pendidikan kesetaraan yang mencakup program paket A setara SD/MI, Paket B setara SLTP/MTs, dan Paket C setara SLTA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional peserta didik”.

Hasil dari pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah proses penilaian penyetaraan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 Sisdiknas Pasal 26 Ayat 6).

Dirjen pendidikan formal dan nonformal (2007:17) mengemukakan tujuan dari pendidikan kesetaraan adalah

1. Memperoleh akses pendidikan dasar Sembilan tahun melalui pendidikan nonformal program paket A setara SD/MI, Paket B setara SLTP/MTs, dan Paket C setara SLTA/MA, yang menekankan pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional
2. Memperluas askes pendidikan menengah melalui jalur pendidikan nonformal program paket C setara SLTA/MA yang menekankan pada keterampilan fungsional dan keterampilan profesional
3. Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan serta relevansi program dan daya saing pendidikan kesetaraan program paket A setara SD/MI, Paket B setara SLTP/MTs, dan Paket C setara SLTA/MA
4. Menguatkan tata kelola, akuntabilitas dan citra public terhadap penyelengggara dan penilaian program pendidikan kesetaraan.

Maka dari konsep kesetaraan ini, program paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal setara SLTA/MA bagi siapapun yang terkendala ke dalam pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. Pemegang ijazah program paket C sudah memiliki hak yang sama dengan pemegang ijazah SLTA/MA.

* 1. **Tujuan Program Paket C**

Adapun tujuan program Paket C (Dirjen pendidikan formal dan nonformal 2007:13) sebagai berikut:

* + 1. Memberikan bekal kemampuan sebagai perluasan/peningkatan dari apa yang telah diterima pada program Paket B setara SLTP/MI
		2. Memberikan bekal kecakapan hidup yang bermanfaat bagi warga belajar untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha secara mandiri
		3. Memberikan bekal pengetahuan, kemampuan, dan sikap mental yang memungkinkan bagi warga belajar melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pendidikan tinggi.

Tujuan lain menurut Suryadi (2007:87) mengemukakan bahwa:

1. Memberikan pembelajaran bermakna dan produktif dengan standar yang memadai
2. Memberikan kecakapan hidup yang berorientasi matapencaharian, kewirausahaan, kejuruan dan pekerjaan.
3. Memberikan pembekalan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan hidupdi masyarakat.

Jadi dapat di simpulkan bahwa tujuan dari Program Paket kesetaraan ini adalah program yang diselenggarakan sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap penddikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat dan pemerataan pendidikan.

1. **Penyelenggara Program Paket C**

Sesuai dengan pedoman program penddikan kesetaraan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Dirjen Pendidikan PLS dan Pemuda (2003:10) penyelenggaraan program paket C dapat berjalan dengan baik jika diawali dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

* 1. **Perencanaan**

Perencanaan merupakan langkah/tahap yang sangat strategis, yang mempengaruhi lancar tidaknya penyelenggara program dan bermutu tidaknya hasil program yang akan dicapai. Oleh karena itu seorang penyelenggara program harus mengetahui dan mampu melaksanakan perencanaan program dengan sebaik-baiknya.

Harold Koontz dan O’Donnell dalam buku Principles of Management (Sukarna 2011:10) mengemukakan bahwa “Perencanaan adalah fungsi daripada Manager di dalam pemilihan alternatife, tujuan-tujuan, kebijaksanaan, procedure-prosedure dan program”.

Dirjen PLS dan Pemuda (2003:9) Pada tahap perencanaan program Paket C adapun tahapan manajerialnya Pendataan calon Warga Belajar, Pengelompokan calon Warga Belajar, Pendataan calon tutor, Penetapan lokasi penyelenggara program, Pengusulan Pelaksanaan Program, dan Penetapan penyelenggara program. Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

* + 1. Pendataan calon Warga Belajar

Dalam proses mencari calon warga belajar, kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara adalah pendataan. Berkaitan dengan pendataan calon warga belajar, maka data-data yang perlu dikumpulkan oleh penyelenggara adalah a) Nama jelas, b) Usia dan Tempat/tanggal lahir, c) Jenis kelamin, d) Pendidikan terkahir yang pernah diikuti,e) Nama orang tua (bapak dan ibu), dan f) Alamat tempat tinggal.

Yang berhak mengikuti program paket C adalah mereka yang memenuhi persyaratan yaitu: Lulusan Paket B atau SLTP/MTs, putus SLTA/MA kelas I S/d III, Bersedian ikut program pembelajaran Paket C, sampai tamat dan lulus.

* + 1. Pengelompokan Calon Warga Belajar

Untuk menentukan seorang WB, apakah mereka mulai belajar dari kelas I, II dan III penyelenggara harus menyelenggarakan tes penempatan kesetaraan atau yang disebut dengan *“placement test”*.

Tatacara penyelenggara *placement test*, dilaksanakan dengan memilih calon WB yang latar belakang pendidikannya putus SLTA kelas III (apalagi dalam waktu cukup lama) tidak secara otomatis masuk setara kelas III, tetapi tergantung hasil *placement test* yang dicapai oleh yang bersangkutan (calon WB) dari hasil *placement test* tersebut ditentukan seorang warga belajar apakah mulai belajar dari ketara kelas I, kelas II, atau kelas III.

* + 1. Pendataan calon tutor dan Narasumber Teknis

Menurut Dirjen PLS dan Pemuda (2003:12) baha dalam penyelenggaraan program paket C harus tersedia tenaga pendidik yaitu tutor dan Narasumber teknis yang bertugas membimbing dan mngajar materi pelajaran sesuai dengan kurikulum paket C yang berlaku serta kecakapan hidup. Pendataan calon tutor dan narasumber teknis dilakukan oleh penyelenggara program dengan persyaratan sebagi belikut:

* + - 1. Tutor : i) minimal tamatan D2 prioritas yang berlatar belakang penddikan keguruan, ii) diutamakan mereka yang berasal dari guru sekolah menengah umum, iii) menguasai sustansi materi pembelajaran yang diajarkan pada program paket C, iv) sehat jaSLTAni dan rohani, v) memiliki dasar kemampuan pembelajaran partisipatif serta mampu mengelola proses pembelajarannya, vi) mau mendidik, mengajar, membimbing dan melatih warga belajar paket C, dan vii) prioritas mereka yang telah mengikuti pelatihan tutor.
			2. Narasuber Teknis : i) memiliki keterampilan kecakapan hidup tertentu yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar paket C prioritas mereka yang telah memanfaatkan kecakapan hidup untuk mencari nafkah, ii) sehat jaSLTAni dan rohani, iii) memiliki dasar-dasat kemampuan pembejaran partisispatif serta mampu mengelola proses pembelajarannya, v) mau mendidik, mengajar, membimbing dan melatih warga belajar paket C, dan vii) prioritas mereka yang telah mengikuti pelatihan tutor.

Pada setiap warga belajar di penyelenggaraan program paket C, jumlah anggota terdiri dari 20-30 orang warga belajar, dan tiap penyelenggara program minimal menyediakan 6 orang tutor dan 1 orang narasumber teknis

* + 1. Penetapan Lokasi penyelenggara Program

Dirjen PLS dan pemuda (2003:15) mengemukakan bahwa pertimbangan yang harus dijadikan acuan oleh penyelenggara program dalam menetapkan lokasi penyelenggraan program paket C adalah: a) lokasi mudah terjangkau oleh warga belajar, b) luas ruang belajar memadai minimal untuk 20 sampai 30 warga belajar, c) tersedianya sarana dan prasarana belajar, d) tersedianya ruangan untuk praktek atau latihan pendidikan kecakapan hidup, e0 memiliki penerangan yang cukup, dan f) terjamin kelangsungan penggunaannya sampai WB menamatkan program belajarnya.

Pada setiap kegiatan pendataan di lokasi-lokasi penyelenggraan program paket C, dalam rangka mencari atau menetapkan lokasi kegiatan, harus dicari lokasi yang paling mendekati dengan kriteria lokasi tersebut. Dengan maksud bahwa, apabila dari pendataan yang dilakukan di beberapa lokasi, tidak diperoleh lokasi yang memenuhi persyaratan bukan berarti program tidak dapat dilaksanakn, akan tetapi dipilih salah satu lokasi atau tempat yang paling mendekati persyaratan sebagai tempat penyelenggaraan program paket C.

* + 1. Pengusulan Pelaksanaan Program

Sesuai dengan mekanisme Dirjen PLS dan pemuda (2003:16) “program paket C merupakan program yang belum dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, karena bukan masuk dalam lingkup untuk mendukung suksesnya program wajib belajar pendidikan dasar”. Oleh karena itu pemerintah pusat dalam program paket C, membiayai terbatas pada aspek penyediaan modul dan pelatihan.

Dengan demikian penyelenggaraan program yang telah memiliki data dan menetapkan calon WB, calon tutor dan narasumber teknis, lokasi penyelenggaraan program selanjutnya penyelenggara program menyusun usulan atau proposal yang diajukan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/Kota untuk mendaptkan bantuan penyelenggaraan program.

* + 1. Penetapan penyelenggara program

Dirjen PLS dan pemuda (2003:18) menetapkan bahwa penyelenggaraan program paket C setelah Dinas Pendidikan menerima usulan berupa proposal dari penyelenggara program selanjutnya memeriksa persyaratan-persyaratan penyelenggara program. Jika semua persyaratan baik teknis maupun administrasi terpenuhi, selanjutnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota membuat surat keputusan tentang penetapan penyelenggaraan program.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah kegiatan awal yang dilakukan secara bersama untuk memikirkan langkah awal penentuan kebijakan sebelum pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan dalam penentuan tujuan.

* 1. **Pelaksanaan**

Setelah melalui tahapan perencanaan serta semua unsur yang menjadi ketentuan pelaksanaan program telah tersedia maka program sudah dapat dimulai atau sudah bisa diselenggarakan yaitu kegiatan program pembelajaran.

Selanjutnya Pelaksanaan Menurut Westra (2014) dijelaskan sebagai berikut:

Sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”.

Sedangkan menurut Nurdin Sultan (2002:70) Pelaksanaan adalah merupakan:

Aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah sebuah proses dalam rangkaian kegiatan yang merupakan kelanjutan dari proses perencanaan yang berawal dari sebuah kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan.

Pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur jika terdidri dari berbagai komponen pelaksana seperti yang diatur dalam Dirjen PLS dan Pemuda (2003:18) yaitu sebagi berikut:

* + - 1. Warga Belajar

Warga belajar merupakan peserta paket C yang akan mempelajari bahan belajar yang telah ditetapkan baik secara perorangan maupun secara kelompok, serta akan mendapatkan bimbingan, latihan, dan pengajaran sesuai kurikulum yang diajarkan.

* + - 1. Tutor

Dalam penyelenggaraan kegiatan paket C, tutor berkewajiban mendidik, mengajar, menyusun rencana belajar dan melatih warga belajar sesuai dengan studi yang dipelajari oleh warga belajar.

* + - 1. Penyelenggara Program

Penyelenggara program merupakan tenaga yang mempunyai peranan yang snagat strategis dalam penyelenggaraan program, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program dan tindk lanjut.

* + - 1. Program Pembelajaran

Kegiatan paket c diatur dalam panduan dimulai dari kegiatan yang proses pembeljarannya tidak terlalu terstruktur. Program belajar dalam seminggu dan lama belajar setiap kali pertemuan ditentukan secara bersama-sama warga belajar, dan tutor serta penyelenggara. Materi dalam proses pembelajarannya diberikan kecakapn hidup, dan mengacu kepada materi dalam pendalaman keilmuan kependidikan. Kemudian jadwal waktu diberikan materi harian yang ditentukan melalui musyawarah dengan warga belajar, totur bersama penyelenggara program.

* 1. **Evaluasi**

Setiap akhir kegiatan secara berkala, dilaksanakan kegiatan pelaporan program yang dilakukan oleh penyelenggara program. Evaluasi ini bertujuan untuk jadi bahan hasil dari penyelenggaran dan pengembangaan program ke depan.

Hunger JD & Thomas L.Wheelen (2003: 19) pengertian Evaluasi adalah sebagai berikut:

Proses yang melalui aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kenerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya, serta elemen akhir yang utama dari manajemen strategi, elemen itu juga yang dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keluaran proses keseluruhan untuk dimulai kembali.

Sudjana (2008:6) mengemukakan bahwa evaluasi adalah “Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data untuk memasukkan dalam pengambilan keputusan mengenai program yang sedang dan/atau telah dilaksanakan”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi dari proses perencanaan sebuah kegiatan hingga pelaksanaan apakah telah sesuai apa yang menjad perencanaan dengan apa yang telah dilaksanakan di lapangan sebagai pendukung operasional suatu kegiatan.

Laporan yang telah di buat kemudian disampaikan kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten/Kota dengan tetap memberikan penyampaian kepada kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program kesetaraan paket C melalui beberapa tahapan iatu tahap perencanaan yang meliputi pendataan, pengelompokan, pendataan tutor dan narasumber teknis, penetapan lokasi, pengusulan pelaksanaan dan penetapan penyelenggara program kemudian tahap pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat kemudian mengevaluasi kegiatan akhir yang telah dilaksanakan.

1. **Kendala-kendala**

Setiap kegiatan yang dilakukan kemungkinan besar akan mengalami sebuah masalah yang menyebabkan beberapa kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, setiap akan melakukan pembuatan perencanaan kegiatan harus memberikan antisipasi pilihan perencaan pertama dan perencanaan kedua agar kegiatan yang dilaksanakan ketika menemui sebuah masalah dapat secepatnya diantisipasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online “Kendala adalah sebuah halangan, rintangan yang membatasi keleluasaan gerak sebuah benda atau suatu sistem”.

Sedangkan menurut Donsantosa dalam kumpulan artikel Ekonomi tentang sebuah Teori kendal mengemukakan bahwa “Kendala adalah suatu peningatan proses yang berfokus pada elemen-eleman yang dibatasi untuk meningkatkan output. Usahanya yang berfokus pada masalah dapat meningkatkan atau memaksimumkan kembali inisiatif yang ada”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kendala adalah sebuah masalah yang biasanya ditemukan dalam suatu kegiatan, namun kendala ini dapat diatasi dengan membuat beberapa perencanaan agar pada proses pelaksanaan kegiatan dapat memperoleh hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya tanpa melalui sebuah kendala atau halangan yang akan dialami oleh kegiatan tersebut.

Fuja Restu Respati (2012) mengemukakan tentang kendala yang dihadapi dalam pendidikan kesetaraan paket C, Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lokasi tempat tinggal warga belajar saling berjauhan sehingga sulit mendapatkan satu kelompok sebanyak 40 orang warga belajar,
2. Latar belakang sosial ekonomi warga belajar lemah sehingga frekuensi kehadirannya sangat rendah,
3. Warga belajar menjadi pencari nafkah keluarga, mereka hanya belajar kalau waktu mengizinkan,
4. Motivasi belajar rendah, mereka berpendapat tanpa belajarpun mereka sudah mendapatkan uang.

Arief Jae (2013) juga mengemukakan kendala yang dihadapi dalam program pendidikan kesetaraan Paket C adalah:

Kendala yang yang paling sering mempengaruhi kegagalan program pendidikan Kesetaraan Paket C antara lain yang paling signifikan adalah faktor ekonomi. Oleh karena itulah faktor ekonomilah yang lebih mereka perhatikan dari pada pendidikan. Pada saat melaksanakan proses belajar ini juga sarat dengan menghadapi berbagai kendala seperti warga belajar yang bermalas-malasan. Kendala lainya adalah masalah cuaca yang kurang bersahabat. Terutama sekali saat-saat musim penghujan. Pada musim penghujan biasanya warga belajar malas keluar rumah untuk diajak belajar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kendala yang paling sering ditemukan pada program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah ekonomi, warga masyarakat lebih memiih untuk mencari uang dari pada belajar sehingga masih banyak yang berfikir sempit bahwa belajar adalah hal yang sia-sia dan mencari uanglah yang lebih penting.

1. **KERANGKA PIKIR**

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan di atas, lebih lanjut akan diajukan kerangka pikir sebagaimana disajikan berikut ini. Pelaksanaan pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) terus dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimana jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya serta dapat diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh”. Sehingga dengan dasar itu pemerintah harus mampu menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan global.

Sesuai dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 098/O/1982 tanggal 16 Maret 1982 tentang dasar didirikannya Sanggar Kegiatan Belaajar sebagai satuan pendidikan nonformal. Dimana secara struktur organisasi SKB terdiri dari Kepala SKB, Kepala TU serta kelompok fungsional. Peran sanggar kegiatan belajar sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota di bidang Pendidikan Nonformal dalam prakteknya pelayanan pendidikan yang diberikan belum benar-benar berkualitas dan efektif. Salah satu program pokok pembelajaran sanggar kegiatan belajar terdapat program pendidikian kesetaraan. Dengan adanya program tersebut peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di SKB Sidrap. Dimana hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan, sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, yaitu dalam 10 patokan Pendidikan Luar Sekolah. Dalam penelitian ini peneliti juga ingin mengkaji bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan. Sehingga dalam pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan lebih baik. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dapat dilihat pada skema kerangka pikir berikut:

 **Input Proses Output**

Proses Penyelenggaraan:

* Perencanaan Pembelajaran
* Pelaksanaan Proses Pembelajaran
* Evaluasi Pembelajaran

10 Patokan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) :

1. Warga Belajar
2. Sumber Belajar
3. Pamong Belajar
4. Sarana Belajar
5. Tempat Belajar
6. Dana Belajar
7. Ragi Belajar
8. Kelompok Belajar
9. Program Belajar
10. Hasil Belajar

Luaran

Paket C

Warga luaran Paket B / tamatan SLTP

 Kendala-kendala

**Gambar 2.1 : Skema Kerangka Pikir**

1. **HIPOTESIS**

Jikawarga belajar melaksanakan proses pembelajaran melalui 3 aspek penyelenggaraan yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi tersebut dengan efektif, maka warga belajar akan mampu LULUS dan memperoleh ijazah paket C.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

* 1. **Pendekatan dan Jenis Penelitian**
1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena data yang diperoleh melalui observasi untuk melihat semua gambaran seluruh aktivitas atau kegiatan penyelenggara, tutor dan warga belajar dalam proses penyelenggaraan program pendidikan paket C di SKB Sidrap.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Studi kasus. Hancock dan Algozzine (2006) menyatakan bahwa “penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek yang disebut sebagai kasus yang dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan berbagai macam sumber data”. Penelitian ini dilakukan secara sendiri oleh peneliti melihat kasus yang akan diteliti mengenai penyelenggaraan program kesetaraan paket C yang ada di SKB Sidrap. Kegiatan penelitian ini meliputi: Perencanaan (*action*), Pelaksanaan (*observing*) dan evaluasi menganalisis data/informasi untuk memutuskan sejauh mana pelaksanaan program tersebut telah berjalan dengan baik atau sebaliknya (*reflecting*).

33

* 1. **Fokus Penelitian**

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui serta memahami tentang situasi dan kondisi tempat penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah Pengelola, dan beberapa Tutor Program Pendidikan Kesetaraan Kejar paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sidrap di jl. Emmi Saelan No.7 Pangkajene, Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, maka ditelusuru dalam 10 Patokan Pendidikan Luar Sekolah sebagai berikut:

1. Warga Belajar
2. Sumber Belajar
3. Pamong Belajar
4. Sarana Belajar
5. Tempat Belajar
6. Dana Belajar
7. Ragi Belajar
8. Kelompok Belajar
9. Program Belajar
10. Hasil Belajar
11. **Deskripsi Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Program Pendidikan Kesetaraan Kejar paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sidrap di jl. Emmi Saelan No.7 Pangkajene, Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Program Pendidikan Kesetaraan Kejar paket C yang sifatnya nonformal namun disetarakan dengan pendidikan formal sehingga karakteristik yang dimiliki Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C berlainan dengan karakteristik yang dimiliki SLTA/SMK.

1. **Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan pada Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kabupaten Sidrap. Dengan memperoleh sumber data dari pihak penyelenggara dan tutor program pendidikan kesetaraan kejar paket C.

Interval waktu pelaksanaan penelitian dilakukan mulai tanggal 01 September s/d 30 November 2015. Data yang peneliti ambil lebih banyak berbentuk wawancara dengan pihak Penyelenggara dan tutor, ini disebabkan karena pada proses penelitian, pelaksanaan pembelajaran program paket C ini belum berlangsung. Sehingga tidak ada proses observasi secara langsung didalam kelas.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian ini ditempuh dengan tiga teknik, yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi:

* 1. Wawancara

Wawancara menurut Djudju Sudjana (2008:194) adalah teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung (tatap muka) antara pihak penanya dengan pihak yang ditanya atau penjawab. Wawancara merupakan teknik utama dalam mengumpulkan data penelitian yang ditujukan kepada informan melalui wawancara langsung, terstruktur dan mendalam kepada informan atau narasumber yaitu pengelola, tutor dan warga belajar pada penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan kejar Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sidrap, Pangkajene kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

Pedoman wawancara dibuat secara terstruktur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan kejar Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sidrap. Data yang diperlukan dalam pedoman wawancara adalah dimulai dari kegiatan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai kepada tahap evaluasi.

* 1. Observasi

Observasi menurut Djuju Sudjana (2008:199) adalah teknik evaluasi yang digunakan dengan mengkaji suatu gejala atau peristiwa melalui upaya mengamati dan mencatat data secara sistematis. Observasi merupakan teknik selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat dan mengetahui secara langsung kondisi riil yang terjadi di lapangan atau sebjek yang diteliti. Kegiatan Observasi dilakukan oleh peneliti secara tidak langsung terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan kejar Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sidrap, Pangkajene kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

* 1. Dokumentasi

Burhan Bungin (2011: 124) menyatakan bahwa studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam penelitian ini data dokumentasi berfungsi untuk memperkuat data tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C di SKB Sidrap. Dokumen yang akan digali dalam penelitian ini adalah surat-surat, data-data informasi, gambar (foto-foto kegiatan), dan berkas-berkas data administrasi tutor dan warga belajar.

1. **Instrumen Penelitian**

Sugiyono (2007: 305-306) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument adalah peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun peneliti juga menggunakan instrumen pendukung pendukung yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi yang dibuat sendiri oleh peneliti.

1. **Keabsahan Data**

Uji keabsahan data menurut Sugiyono (2007: 368) dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check. Namun teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini guna memeriksa keabsahan data yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi.

* + - 1. Peningkatan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Selain itu, dengan peningkatan ketekunan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

1. Trianggulasi

Sugiyono (2007: 372) memaparkan bahwa triangulasi dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Sedangkan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari beberapa sumber tersebut, data di deskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari beberapa sumber tersebut, kemudian data dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

1. **Teknik Analisis Data**

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007: 337) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu, data reduction, data display dan conclusion drawing/ verification. Tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini yaitu:

* + - 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

* + - 1. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007: 341) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 54 teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

1. Conclusion Drawing/ Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007: 345) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkam data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

* + - 1. **Gambaran Umum Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sidrap**

UPT. PJLS/SKB Sidenreng Rappang sudah ada sejak tahun 1978, yang semula bernama PLPM berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0206/0/1978.

Berdasarkan SK Kemendikbud tersebut PLPM di ubah namanya menjadi SKB Sidenreng Rappang dan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidrap dan dibawah pusat pembinaan BPPLSP.

Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 2002 tentang peralihan (Otoda) maka status SKB menjadi UPTD. PJLS/SKB Sidrap. Institusi ini sejarah nota bene bergerak di bidang Pendidikan Luar Sekolah. Jika ditinjau dari segi umur, maka SKB Sidenreng Rappang telah berumur lebih dari Dua Dasawarsa, yang jika ditinjau dari segi umur yang dipadu padankan dengan umur anak manusia beranjak Dewasa. Sepanjang perjalanan gaung SKB Sidenreng Rappang mengalami silih bergantinya estafet kepemimpinan. Ini semua merupakan suatu hukum alam yang berlaku bagi manusia *(Natural Right).* Selama kurung waktu tersebut telah menjadi pergantian kepemimpinan sebagai berikut:

Periode I Tahun 1978 s.d 1980 = H. Abd. Majid Langko

Periode II Tahun 1980 s.d 1995 = H. Abd. Salam, S.BA

41

Periode III Tahun 1995 s.d 2000 = H. M. Assad, Ba

Periode IV Tahun 2000 s.d 2003 = Dra. Hj. Rahmi Hasyimin

Periode V Tahun 2003 s.d 2005 = Drs. Supratman I

Periode VI Tahun 2005 s.d 2009 = Drs. Andi Uceng

Periode VII Tahun 2009 s.d 2014 = Muh. Nur, S,Pd

Periode VIII Juli 2013 sampai sekarang = Hj. Hartati, S.Pd

Itulah kiasan (sejarah) yang dilingkupi dan mewarnai SKB Sidenreng Rappang dalam mengembangkan dan menumbuhsuburkan Pendidikan Luar Sekolah. Tidak terlalu banyak prestasi yang diraih oleh SKB Sidenreng Rappang. Akan tetapi bolehlah berbesar hati dari 24 SKB Se-Sulawesi Selatan pernah mengikuti beberapa prestasi antara lain:

* + 1. Lomba Kebersihan dan Keindahan Tkt. Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1999 menduduki peringkat 1 (Pertama)
		2. Lomba seleksi Pamong Belajar Teladan Tkt. Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat 1 (Pertama) dan peringkat 11 (Sebelas) Nasional.
		3. Lomba seleksi Pamong belajar pada Jambore PTK-PNF Tahun 2009 menduduki peringkat ke 2 (Dua) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Maka dengan berlakunya peraturan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 2 tentang peralihan (Otoda) maka status SKB menjadi UPT Pendidikan Luar Sekolah / SKB Sidrap. Sesuai dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata pembentukan dan susunan organisasi UPT Pendidikan Jalur Luar Sekolah / SKB Sidrap ( Sanggar Kegiatan Belajar) Kab. Sidrap.

**Gambar 4.1 : STRUKTUR ORGANISASI**

**UPTD SKB SIDRAP**

KEPALA SKB

**HJ. HARTATI, S.PD**

POKJA SIM

**Ratna**

**Karma**

**Sartika**

POKJA KELEMBAGAAN

**Jumadil**

**Karma**

**Hasriani**

POKJA KF

**Mardiah**

**Ratna**

POKJA KESETARAAN

**Dra. Hj. Darmina**

**Marawiah**

**Abdul Latif**

POKJA PAUD

**Jeni Malia**

**Sartika**

**Rahmawati**

KELOMPOK FUNGSIONAL KOORDINATOR PAMONG BELAJAR

**Dra. Hj. DARMINA**

Ka. URUSAN TU

**Ir. SITTI RAHMAT, M.Si**

U. PERLENGKAPAN

**MARAWIAH**

U. KEPEGAWAIAN

**JUMADIL SALAM**

U. KEUANGAN

**MARDIA**

1. **Visi dan Misi UPTD SKB Sidrap**

Adapun Visi UPTD SKB Sidrap adalah sebagai berikut:

“Mengupayakan Peningkatan Pelayanan Program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, yang berorientasi kepada kebutuhan Masyarakat”.

 Adapun Misi UPTD SKB Sidrap adalah sebagai berikut:

* + 1. Mengadakan Program sesuai dengan Prioritas Kebutuhan Masyarakat
		2. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan serta kursus bagi masyarakat
		3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah
1. **Daerah Operasional UPTD SKB Sidrap (Wilayah kerja)**

UPTD SKB Kab. Sidrap memiliki lingkup Kecamatan yang terbagi atas 11 (Sebelas) yakni:

* 1. Kecamatan MaritengngaE
	2. Kecamatan Wattang Pulu
	3. Kecamatan Panca Rijang
	4. Kecamatan Wattang Sidenreng
	5. Kecamatan Dua Pitue
	6. Kecamatan Baranti
	7. Kecamatan Kulo
	8. Kecamatan Pitu Riawa
	9. Kecamatan Pitu Riase
	10. Kecamatan Tellu Limpoe
	11. Kecamatan Panca Lautang
1. **Ketenagaan**

UPTD SKB Kab. Sidrap juga memiliki SDM Sebanyak 16 orang yang terdiri atas:

1. Tenaga Pamong Belajar 3 orang dengan kualifikasi Pendidikan
2. Tenaga Tata Usaha 3 orang dengan kualifikasi pendidikan
3. Tenaga Lapangan Diknas (TLD) 3 orang dengan Kwalifikasi pendidikan S1
4. Tenaga sukarela/sosial dengan kualifikasi pendidikan S1 dan SLTA sebanyak 7 orang
5. **Program-program**
	* 1. Program Pendidikan Non Formal
	1. Kursus Komputer (1 Kelompok)
	2. Kursus Bordir (1 Kelompok)
	3. Kursus Menjahit (1 Kelompok)
	4. Kursus Berwawasan Garden/pembuatan jus (1 Kelompok)
		1. Program PTK-PNF
	5. Peningkatan Mutu Pendidik PNF melalui Pelatihan KTSP
	6. Harlindung melalui Study Banding ke SKB Malang, Jatim
	7. Bantuan Beasiswa S1 2 Orang
		1. Program Pendidikan Non Formal
	8. Keaksaraan Fungsional Tingkat Dasar (5 Kelompok)
	9. Keaksaraan Fungsional Tingkat Lanjutan (2 Kelompok)
	10. Paket A Kelas V (1 Kelompok)
	11. Paket A Kelas VI (2 Kelompok)
	12. Paket B Kelas Reguler (1 Kelompok)
	13. Paket C Kelas Swadaya (1 Kelompok)
	14. **Hasil Penelitian**

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian dari berbagai permasalahan yang diperoleh peneliti di lapangan. Data penelitian tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C di SKB Sidrap ini diperoleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Subyek yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Pengelola Pendidikan Kesetaraan dan beberapa tutor. Berikut dapat disajikan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari lapangan.

* + - 1. **Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di SKB Sidrap**
	1. Latar Belakang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C SKB Sidrap

Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas mengamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini mengandung makna siapapun warga negara Indonesia dan dimanapun dia berada harus memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya. Pada tahun 2000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sidrap menetapkan SKB Sidrap berkedudukan sebagai UPT Pusat dibawah Dikpora. Sehingga SKB berubah menjadi SKB Sidrap dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap. SKB ini terletak di Jalan Emmi Saelan No.7 Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. SKB Sidrap dipilih sebagai lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan. Hal ini dikarenakan secara geografis letak SKB Sidrap sangat strategis, yaitu di tengah kota dan berada dekat dengan Dikpora Sidrap, sebelum disatukannya SKPD di Kabupaten Sidrap. Jumlah penduduk di daerah Sidrap cukup banyak, namun karena tingkat pendidikan masyarakatnya dulu masih sangat rendah. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di SKB Sidrap diselenggarakan berdasarkan UU RI No. 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan 64 Nasional, Keputusan Mendiknas No. 86/U/2003 tentang Penghapusan Ujian Persamaan, Keputusan Mendiknas No. 0132/u/2004 tentang Program Paket C, PP No. 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas No. 23 Th 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Surat Edaran Mendiknas No. 107/MPN/MS/2006 tentang Eligibilitas Program Kesetaraan, Permendiknas No. 14 Th 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan, Permendiknas No. 3 Th 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan serta Peraturan Bupati No. 131 Th 2008. SKB Sidrap ini berdiri diatas lahan pemerintah. Luas lahan SKB Sidrap adalah 3105 m², sedangkan luas bangunannya adalah 1818 m². Keseluruhan lahan sudah di gunakan dengan baik, termasuk didalamnya adalah mushollah, lapangan voli, aula dan tempat parkir. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C di SKB Sidrap ini diselenggarakan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mungkin mengenyam pendidikan formal.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh JS (Wawancara pada tanggal 28 September 2015) sebagai Penyelenggara bahwa:

Ya, latar belakangnya itukan memberi kesempatan pada warga belajar yang tidak mungkin mengenyam pendidikan formal, dan tidak memandang umur, juga untuk meningkatkan kompetensi warga belajar yang belum memenuhi. Karena kan saat kerja nanti butuh ijazah, jadi bisa dipakai untuk meingkatkan taraf hidup warga belajar juga, serta untuk menunjang karir, biar bisa sukses.

Hal serupa juga dinyatakan oleh DR: (Wawancara pada tanggal 28 September 2015) sebagai Tutor bahwa:

Latar belakang pelaksanaan pendidikan kesetaraan itu karena wajar Dikdas 9 tahun mbak, jadi 12 tahun oleh karena itu ada sma, karena pendidikan kesetaraan paket c kan setara dengan sma, jadi itu alasannya. Selanjutnya, banyak lulusan smp yang tidak bisa melanjutkan, mungkin karena ekonomi, atau tidak lulus, atau putus sekolah dikeranekan hal lain. Selain itu dari segi ekonomi, geografis dan sosial, masyarakat sangat membutuhkan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C di SKB Sidrap adalah karena banyaknya siswa SMP yang tidak mungkin menuntaskan pendidikan formal yang dikarenakan berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, dan sosial. Selain itu yang melatar belakangi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C adalah keputusan pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun. Sedangkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa secara garis besar latar belakang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C di SKB Sidrap adalah karena tingginya animo masyarakat serta adanya dukungan dari pemerintah, berupa ketegasan hukum serta dukungan-dukungan lainnya. Sehingga hal tersebut telah sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C.

* 1. Tujuan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C di SKB Sidrap

Tujuan penyelenggaraan program pada sebuah lembaga, merupakan alat penentu arah kemana program tersebut akan berjalan. Pencapaian tujuan tersebut yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah lembaga dalam melaksanakan program. Begitu juga dengan SKB Sidrap. Penyelenggaraan program yang salah satunya adalah pendidikan kesetaraan paket C memiliki tujuan. Tujuan tersebut sepertinya sudah dipahami oleh semua pihak terkait penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh JS (Wawancara pada tanggal 28 September 2015) sebagai Penyelenggara bahwa; ”tujuannya ya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga belajar untuk memperoleh pendidikan dalam hal ini pendidikan kesetaraan paket C”.

Hal serupa juga dikemukakan oleh MR(Wawancara pada tanggal 28 September 2015) sebagai Tutor bahwa; “ya untuk memajukan pendidikan kesetaraan paket C yang tidak tercover formal dan membantu yang putus sekolah”.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pihak terkait penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C di SKB Sidrap sudah memahami tujuan diselenggarakannya program tersebut. Mereka sudah memahami bahwa tujuan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan paket C adalah memperluas akses pendidikan menengah melalui jalur pendidikan nonformal. Meningkatkan mutu dan daya saing program dan lulusan, sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mampu memasuki dunia kerja maupun berwirausaha.

* 1. 10 Patokan Pendidikan Luar Sekolah dalam Penyelenggaran Program Kesetaraan Paket C

Salah satu bentuk partisipasi SKB Kab. Sidrap dalam pemberantasan permasalahan masyarakat yang tidak sempat menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SLTA) yakni melalui Program Pendidikan Kesetaraan kejar Paket C yang merupakan kerja sama dari pemerintah Kabupaten Sidrap dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sidrap yang masih merupakan UPTD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidrap. Penyelenggaraan Proram Pendidikan Kesetraan Paket C yang ada di SKB Sidrap terbagi atas 2 bagian yakni Paket C Reguler dan Paket C Swadaya. Dalam penelitian ini Paket C yang digunakan adalah paket C Swadaya yang pelaksanaannya hanya 6 bulan saja. Adapaun rincian pelaksanaan penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C dalam 10 Patokan Pendidikan Luar Sekolah adalah Sebagai Berikut:

Warga Belajar

Warga belajar adalah warga masyarakat yang ikut dalam suatu proses kegiatan pembelajaran yang diadakan oleh lembaga guna mencerdaskan bangsa tanpa harus membatasi usia, dan tingkat kemampuan yang dimiliki masing-masing warga belajar.

Menurut JS (Wawancara, pada tanggal 28 September 2015) sebagai penyelenggara bahwa:

Untuk pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket C tidak ada batasan usia maksimal dan minimal, hanya saja mereka diharuskan telah memiliki ijazah SLTP atau sederajat ataupun ijazah Paket B sebelumnya dengan sasaran warga belajar sebanyak pendaftar yang ada dan masing-masing akan dibagi kedalam kelompok. Untuk tugas dari penyelenggara adalah merekrut atau mengumpulkan warga belajar dengan menghubungi kelurahan atau pemerintah setempat setiap kecamatan bahwa akan ada perekrutan warga belajar paket C di SKB Sidrap.

Jadi dapat disimpulkan bahwa warga belajar adalah warga masyarakat yang mengikuti proses pembelajaran yang tidak di batasi oleh usia namun tetap harus memiliki ijazah SLTP atau sederajat sebagai patokan untuk memperoleh ijazah yang setara dengan SLTA yakni dengan program pendidikan kesetaraan Paket C.

* + - * 1. Sumber Belajar

Sumber belajar adalah seseorang yang di ajarkan dan memberikan pengetahuan kepada warga belajar dan tidak tertutup kemungkinan juga memperoleh pengetahuan dari pihak pengelola untuk diajarkan kembali kepada warga belajar. Sumber belajar ini disebut juga sebagai tutor atau narasumber teknis.

Menurut JS (Wawancara, pada tanggal 28 September 2015) sebagai penyelenggara bahwa sumber belajar yang digunakan adalah:

Sesorang telah diberikan pembelajaran langsung dari pengelola untuk dapat kembali diajar kepada warga belajar, melalui beberapa pelatihan sebelum diterjunkan langsung untuk mengajarkan pengetahuan yang diberikan kepada warga belajar, untuk pada pembelajaran awal, tidak dilakukan tes kemampuan awal pada warga belajar, tutor secara langsung mengajarkan pada warga belajar tentang soal-soal ujian sebelumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah seseorang yang memberikan pengetahuan setelah sebelumnya diberikan pengetahuan awal dari pengelola untuk diterapkan kepada warga belajar. Untuk proses awal pembelajaran tidak dilakukan tes kemampuan awal pada warga belajar. Sumber belajar yang biasanya juga disebut sebagai tutor langsung mengajarkan untuk proses pembelajaran dengan melihat materi-materi pada Ujian Nasional paket C sebelumnya.

* + - * 1. Pamong Belajar

Pamong belajar adalah kelompok masyarakat yang menjamin terselenggaranya proses belajar. Pamong belajar juga sebagai yang mempertemukan sumber belajar/ tutor dengan warga belajar, mempertemukan yang memberikan pengetahuan dengan yang akan menerima pengetahuan.

Menurut JS (Wawancara, pada tanggal 28 September 2015) sebagai penyelenggara bahwa:

Guna efektifnya pelaksanaan program pendidikan Kesetaraan Paket C pamong belajar memberikan perintah kepada tutor untuk memberikan warga belajar dalam kelompok dibina/diajar oleh 3 orang tutor dibantu oleh penyelenggara setempat yang telah dilatih sebeum penyelenggaraan program paket C dilaksanakan. Direkrut oleh penyelenggara program dan adapun syarat untuk menjadi tutor minimal bependidikan Sarjana (S1) dan mempunyai pendidikan yang dapat ditransfer kepada warga belajar dan bertempat tinggal dilokasi yang tidak jauh dari SKB serta menguasai materi yang telah diberikan. Untuk intensif tutor yang diberikan akumulasi dari biaya administrasi warga belajar yang telah di rincikan sebelumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pamong belajar adalah kelompok masyarakat yang memberikan jaminan penyelenggaraan proses pembelajaran yang mempertemuka warga belajar dan tutor belajar. Pamong belajar menentukan sumber belajar atau tutor belajar untuk membagi warga belajar kegalam kelompok. Pamong belajar pula yang akan memberikan intensif dan melatih terlebih dahulu tutor sebelum melatih dan memberikan pengetahuan sebelum mengajarkan warga belajar.

* + - * 1. Sarana Belajar

Sarana belajar digunakan pada proses pembelajaran untuk mendukung pelaksnaan program Pendidikan Kesetaraan Paket C seharusnya didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran, sarana tersebut seperti bahan, alat, perkakas dan perabot guna kelangsungan proses pembelajaran pada warga belajar.

Menurut JS (Wawancara, pada tanggal 28 September 2015) sebagai penyelenggara bahwa

Kondisi sangat sederhana terlihat di ruangan khusus untuk Paket C di Kantor SKB Sidrap yang sudah mulai tak terurus. Terlihat kursi dan meja yang ada beberapa serta meja dan kursi tutor dan beberapa lemari yang berisi buku-buku dan contoh soal ujian sebelumnya yang pada beberapa bulan yang lalu telah digunakan, namun dibiarkan kemabli karena belum dimulainya proses pembelajaran untuk tahun 2016. Adapun media yang biasanya digunakan adalah LCD yang dimiliki oleh SKB serta buku-buku SLTA sederajat yang juga dapat menjadi acuan dalam belajar mengajar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana belajar adalah alat penukung terselenggaranya proses pembelajaran. Sebagai alat pendukung terselenggaranya proses pembelajaran fasilitas yang ada harus menggunakan sarana yang masih layak pakai demi kenyamanan proses pembelajaran yang akan berlangsung. Alat peraga pendidikan juga diperlukan sebagai pelengkap agar warga belajar dapat lebih cepat memahami materi pembelajaran.

* + - * 1. Tempat Belajar

Tempat belajar adalah tempat dimana memungkinkan dan memenuhi persyaratan untuk tutor dan warga belajar melangsungkan proses pembelajaran.

Menurut JS (Wawancara, pada tanggal 28 September 2015) sebagai penyelenggara bahwa “Pelaksanaan lokasi pembelajaran di SKB kadang jika warga belajar bosan, meraka diajak belajar di kecamatan lain yang tidak begitu jauh dari SKB. Untuk penentu waktu dan letak lokasi pembelajaran diambil alih oleh SKB”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tempat belajar adalah lokasi pembelajar yang nyaman untuk menjadi tempat belajar bagi warga belajar dan tutor menyampaikan materi pembelajarannya. Adapun tempat pembelajaran bagi warga belajar paket C si SKB Sidrap adalah lokasi SKB, namun jika warga belajar merasa bosan, maka diminta kesedian salah satu warga untuk meminjamkan rumahnya namun persyaratannya tidak begitu jauh dari SKB.

* + - * 1. Dana Belajar

Dana belajar adalah materi yang dapat menunjang proses pembelajaran yang telah disusun oleh pengelola agar semua dapat terpenuhi dengan baik. Misalnya dana swadaya dari warga belajar yang akan mengikuti proses pembelajaran dikumpulkan oleh pengelola yang selanutnya dibagikan menjadi beberapa dan contohnya dana intensif tutor, dana pembuatan ijazah dan sebagainya.

Menurut JS (Wawancara, pada tanggal 28 September 2015) sebagai penyelenggara bahwa:

Selama proses pembelajaran dana yang diberikan baik berupa materi maupun uang kepada warga belajar tidak ada. Malah sebaliknya, mereka yang mengeluarkan uang untuk belajar dan memperoleh ijazah. Itu sebabnya program pendidikan Paket C ini disebut sebagai pendidkan Paket C swadana, karena pendanaan dari warga belajar. Jadi mereka akan rugi jika tidak mengikuti dengan baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dana belajar adalah materi yang menjadi penujang pada proses pembelajaran. Namun untuk dana belajar ini dari swadaya warga belajar sendiri dan menjadi tugas pokok tersendiri dari pengelola untuk dapat menyusun perincian anggaran agar semua dana terpenuhi dalam proses pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Paket C misalnya dana intensif tutor, pembuatan ijazah dan lain-lain.

* + - * 1. Ragi Belajar

Ragi belajar adalah semacam sebuah rangsangan belajar guna memberikan motivasi bagi warga belajar untuk dapat bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Ragi belajar ini merupakan unsur yang sangat penting dalam belajar, sebab dalam proses pembelajaran bagi warga belajar tidak diperbolehkan untuk memaksa warga belajar, sehingga motivasi yang diberikan harus dimaksimalkan.

Menurut JS (Wawancara, pada tanggal 28 September 2015) sebagai penyelenggara bahwa:

Agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal dalam membelajarkan warga belajar, tutor memberikan motivasi belajar untuk warga belajar melalui metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan ekperimen karena dari kegiatan ini tutor akan memotivasi warga belajar dari mulai memberikan ceramah, menanyakan secara langsung apa yang menjadi penyebab kurangnya motivasinya dan dilakukan pembeljaran yang langsung pada proses praktek atau eksperimen. Namun kadang tidak semua warga belajar dapat menerima dengan baik. Masih banyak pula yang tidak menyukainya ataukah ada pekerjaan lain sehingga pada pelaksanaannya kurang dari beberapa yang menyempatkan untuk mengikuti proses pembelajaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ragi belajar adalah bentuk rangsangan belajar yang di berikan kepada warga belajar agar dapat memberikan motivasi belajar kepada warga belajar. Namun kembali lagi bahwa tidak semua warga belajar dapat menerima dengan baik, banyak yang tidak menyukai bahkan tidak ingin mengikuti kegiatan in karena prosesnya tidak boeh melibatkan kata memaksa.

* + - * 1. Kelompok Belajar

Kelompok belajar adalah beberapa warga belajar yang dibagi kedalam beberapa orang yang bersedia belajar secara bersama-sama yang memiliki tujuan yang sama untuk dapat memperoleh pengetahuan. Warga belajar ini terdiri atas 10-20 orang, tergantung dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola ataupun dari pemerintah yang menaunginya.

 Menurut JS (Wawancara, pada tanggal 28 September 2015) sebagai penyelenggara bahwa:

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran program paket C biasanya paling banyak hanya 2 kelompok saja yang didalam 1 kelompok sebanyak 20 orang. Adapun penentuan kelompoknya dilakukan dengan menggunakan Dalam Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK) Depdiknas mengatur tentang jumlah warga belajar dalam 1 kelompok paket C sebanyak 20 orang dan untuk syarat warga belajar dalam satu kelompok tidak ada penggolongan. Hal tersebut diatur dalam Standar Kompetensi Keaksaraan berisi seperangkat standar kompetensi pendidikan kesetaraan untuk mengembangkan kemampuan (a) menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi, (b) memanfaatkan kemampuan dan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari, (c) memotivasi dan memberdayakan dirinya, (d) meningkatkan mutu dan taraf hidupnya dan (e) menjadi anggota masyarakat yang gemar belajar.

Jadi dapat disimpilkan bahwa kelompok belajar adalah kumpulan beberapa warga belajar yang akan menerima proses pembelajaran yang memiliki tujuan yang sama memperoleh pengetahuan. Jumlah orang dalam satu kelompok tersebut sebanyak 20 orang yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan telah diatur dalam Sistem Kompetensi Keaksaraan (SKK) Depdiknas tentang jumlah warga belajar dalam satu kelompok maksiman 20 orang 1 kelompok.

* + - * 1. Program Belajar

Program belajar adalah serangkaian kegiatan yang berisi bentuk pembelajaran, cara pembelajaran dan waktu pembelajaran. Program pembelajaran tidak diatu dan tidak dipaksakan kepada warga belajar, melainkan tumbuh dari keinginan dari warga belajar itu sendiri.

Menurut JS (Wawancara, pada tanggal 28 September 2015) sebagai penyelenggara bahwa:

Sesuai ketentuan dalam Standar Kompetendi Keaksaraan (SKK), Standar Kompetensi Level 1 diperlukan waktu penyelesaian 120 jam pelajaran @60 menit. Karena itu, ditetapkan alokasi waktu pembelajaran termasuk pertemuan sebnayak 2-3 kali seminggu, masing-masing selama 60 menit. Namun, dalam pelaksanaan prakteknya sebagaimana disepakati warga belajar sesuai dengan keadaannya pada hari tersebut, jika berhalangan maka akan pindahkan atau sekalian tidak terlaksana. Biasanya pelaksanaanya dimulai pada siang hari pukul 13.00 wita sampai selesai. Untuk program paket C yang telah disebutkan tadi bahwa paket C ini adalah paket C swadaya sehingga pelaksanaannya hanya berkisar 6 bulan lamanya. Adapun untuk materi pembelajaran tidak dibatasi, semua mengikut pada contoh soal sebelumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa program belajar adalah rangkaian kegiatan yang berisi bentuk, cara dan waktu pembelajaran. Program belajar juga seharusnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan warga belajar. pelaksanaanya digunakan sebnayak 2 kali pertemuan setiap minggu yang berkisar 60 menit pembelajaran. Untuk materi pembelajarnnya tidak dibatasi karena warga belajar juga mengambil beberapa pelajaran baru soal-soal ujian sebelumnya untuk dipelajari kembali.

* + - * 1. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah serangkaian pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki warga belajar selepas melaksanakan serangkaian proses pembelajaran. Hasil belajar setidaknya memperoleh hasil dari proses pembelajaran yang telah dilalui sebelumnya.

Menurut JS (Wawancara, pada tanggal 28 September 2015) sebagai penyelenggara bahwa:

Kami melaksanakan penilaian 5 bulan setelah proses pembelajaran, dilakukan ujian semester. Selanjutnya di bulan berikutnya dibulan ke 6 pembelajaran persiapan untuk Ujian Akhir Nasional setelah pelaksanaan ujian Nasional tingkat SLTA sederajat, jadi kita juga dapat mengambil contoh unjian nasional SLTA untuk diajarkan kembali kepada warga belajar sebelum unjian Nasional. Adapun saran untuk penyelenggaraan program pendidikan Kesetaraan paket C selanjutnya agar dana dari Dinas pendidikan dapat dicairkan untuk pelaksanaan paket C karena kasian mereka warga belajar yang membayar untuk dapat mengikuti progrm paket C, dan tidak di pungkiri bahwa pelaksanaanya agak terkesan asal terlaksana dan mereka langsung memperoleh ijazah tanpa proses belajar.

Jadi dapat dsimpulkan bahwa hasil belajar adalah rangkaian pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dari serangkaan proses pembelajaran yang telah dilalui sebelumnya. Untuk program pendidikan kesetaraan Paket C ini adalah program yang hanya berlangsung selama kurang lebih 6 bulan saja, sehingga setelah proses pembelajaran selama 6 bulan warga belajar akan langsung melaksanakan ujian sebagai hasil akhir dari proses pembelajaran.

* + - 1. **Kendala yang ditimbulkan Selama Proses Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran program pendidikan kesetaraan Paket C di SKB Sidrap tak lepas dari beberapa permasalahan dan kendala, kendala terbesar tersebut terkait dengan masalah dana yang betul-betul memutar otak pengelola untuk keberlangsungan kegiatan yang pelaksanaannya sampai 3 tahun lamanya. Sehingga pada program Kesetaraan paket C yang dapat terlaksana di SKB Sidrap itu hanya program Paket C Swadaya. Menurut JS (Wawancara, pada tanggal 28 September 2015) sebagai penyelenggara bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program kesetaraan Paket C di SKB Sidrap, yakni:

* 1. Proses pembelajarannya yang hanya berlangsung selama 6 bulan saja padahal seharusnya harus lebih dari itu untuk keefektifan proses pembelajaran.
	2. Adanya sebagian warga belajar yang harus dibujuk dirumahnya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.
	3. Adanya warga belajar yang kurang memiliki motivasi untuk mengikuti pembelajaran.
	4. Adanya warga belajar yang lebih memilih bekerja dari pada belajar.

Jadi dapat dsimpulkan keterangan dari hasil wawancara dengan penyelenggara mengenai kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran adalah proses pembelajaran yang hanya berlangsung selama 6 bulan saja, banyaknya warga yang harus mesti dibujuk terlebih dahulu, kurangnya motivasi dalam dirinya untuk memperoleh pengetahuan, dan tidak sedikit pula warga yang memilih untuk bekerja dari pada harus belajar.

Informasi tambahan yang diperoleh dari (Wawancara, pada tanggal 11 November 2015) sebagai tutor bahwa:

Ada sebagaian warga belajar semakin waktu semakin malas mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, dana transportasi yang ditanggung sendiri sehingga menyebabkan mereka malas mengikuti proses pembelajaran, hanya ingin ikut ujian saja dan memeperoleh ijazah. Padahal yang sebenarnya tidak boleh, semunya harus melalui proses, mau jawab apa mereka pada saat ujian ketika tidak belajar terlebih dahulu.

Jadi dapat disimpulkan keterangan dari hasil wawancara dengan tutor mengenai kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran warga belajar yang semakin malas mengikuti proses pembelajaran karena jarak rumah yang terlampau jauh, transportasi yang harus mereka keluarkan sendiri dan segala macam biaya harus mereka tanggung sendiri sehingga membuat warga belajar tersebut malas untuk mengikuti proses pembelajaran.

 Beberapa pernyataan diatas menunjukkan berbagai kendala yang dihadapi pelaksana dalam pelaksanaan program kesetaraan Paket C di SKB Sidrap. Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya-upaya yang ditempuh pengelola adalah tetap mengadakan kegiatan tersebut pada 2 tahun terkahir ini, karena desakan masyarakat yang memang mebutuhkan Ijazah sehingga dana swadaya dari masyarakat tersebut sedemikian dikelola agar mencukupi untuk program selama pelaksanaan berlangsung, baik itu untuk insentif tutor, dan hal-hal penting lainnya. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program pendidikan kesetaraan Paket C di SKB Sidrap.

* 1. **Pembahasan**

Berdasarkan penyajian data lapangan di atas, kesaksian dari penyelenggara dan tutor tanpa melihat rutinitasnya sangat membuat peneliti masih bertanya-tanya mungkinkah penyelenggaraan program paket C ini benar-benar bejalan dengan efektif atau tidak? Melihat beberapa keganjilan yang ada salah satunya pelaksanaan yang hanya berjalan selama 6 bulan Warga belajar dapat lulus sedangkan Siswa SMA saja yang melakukan proses pembelajaran selama 3 Tahun belum tentu dapat mengetahui secara keseluruhan materi pembelajarn yang diberikan untuk dapat LULUS pada pelaksanaan Ujian Nasional nantinya. Keganjilan yang lain pun masih menjadi pertanyaan besar apakah penyelenggara dan tutor ini benar-benar melaksanakan program ini dengan baik melihat pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket C yang disebut Swadaya benar-benar memberikan pengetahuan dengan baik ataukah dengan diberikan bayaran yang lebih apalagi ketika Warga belajar ini orang berada dan seenaknya memberikan bayaran yang lebih sehingga bisa saja dengan sogokan warga belajar tersebut dapat memperoleh ijazah saja tanpa ada proses pembelajaran. Wallahu Alam.

Peneliti mencoba melakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu meliputi; 1) Penyelenggaraan Program pendidikan kesetaraan paket C di SKB Sidrap 2) Kendala yang ditimbulkan pada pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket C di SKB Sidrap. Berikut akan dikemukakan pembahasan penelitian penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C di SKB Sidrap.

* + - 1. **Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di SKB Sidrap**

Pendidikan kesetaraan lahir sebagai upaya untuk menjembatani keinginan, kebutuhan dan peluang para peserta didik dalam mengikuti program pendidikan yang hasilnya dapat di setarakan. Departemen Pendidikan Nasional (2009: 78) menyebutkan bahwa Program pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan yang dirancang dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi konten, konteks, metodologi dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep-konsep terapan, tematik, induktif yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatihkan kecakapan hidup, berorientasi kerja atau berusaha mandiri. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket C di SKB Sidrap masih memiliki berbagai kendala, antara pelaksanaannya yang hanya berlangsung selama 6 bulan, warga belajar yang malas-malasan karena seluruh biaya ditanggung oleh mereka, warga belajar yg kurang termotivasi, dan lain-lain. Mengeni permasalahan tersebut peneliti akan membahas kedalam sudut pandang Penyelenggaraannya dari mulai bagaimana Pelaksanaan, Perencanaan dan Evaluasi pembelajaran. Perencanaan merupakan langkah/tahap yang sangat strategis, yang mempengaruhi lancar tidaknya penyelenggara program dan bermutu tidaknya hasil program yang akan dicapai. Oleh karena itu seorang penyelenggara program harus mengetahui dan mampu melaksanakan perencanaan program dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mencoba menganalisa permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket c di SKB Sidrap.

* + 1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah, tujuan dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode/teknik yang tepat (Engkoswara dan Aan Komariah (2010: 94). Merencanakan adalah membuat keputusan mengenai arah yang akan dituju dalam hal ini adalah penetapan tujuan pelaksanaan pendidikan. Tujuan pelaksanaan pendidikan kesetaraan sudah dirumuskan pada awal penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan kabupaten Sidrap. Perencanaan yang selanjutnya adalah tindakan yang akan diambil. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan pengelola kurang memaksimalkan apa yang menjadi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penyebabnya dikarenakan warga belajar yang ingin memperoleh ijazah tanpa proses pembelajaran tersebut yang menanggung seluruh beban biaya dan ini menjadi pemicu pihak penyelenggara terpengaruh untuk mengadakan penyelenggaraan paket C ini, melihat banyaknya masyarakat yang ingin memperoleh ijazah dan tidak adanya bantuan pendanaan dari pihak pemerintah untuk program ini. Oleh sebab itu, program yang seharusnya dilaksanakan selama 3 tahun dikerucutkan menjadi 6 bulan saja dan program ini sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya di SKB Sidrap. Dalam hal perencanaan awal yang meliputi 10 patokan tersebut mungkin berjalan baik menurut pengelola, namun sangat tidak efektif karena waktu pelaksanaan pembelajarannya yang hanya berlangsung selama 6 bulan, yang tujuan awal pendidikan yang ingin menyetarai pendidikan SMA pelaksanaannya selama 3 tahun dapat seimbang jika dilaksanakan hanya selama 6 bulan saja.

Namun inilah realita, melihat nilai hasil ujian yang terlampir terlihat ada warga belajar yang dapat lulus walaupun banyaknya masalah yang terdapat pada pelaksanaan program ini. Sebuah kesyukuran tersendiri bagi peneliti sebagai peneliti ketika telah melihat berkurangnya lagi angka putus sekolah yang telah dilaksanakan oleh SKB Sidrap, mengingat masyarakat masih banyak yang membutuhkan hal tersebut. Apa lagi bagi mereka yang memiliki masalah difaktor ekonomi namun karena seluruh aktifitas pembelajaran dibebankan kepada warga belajar sendiri merupakan hal yang sangat miris. Seharusnya program ini justru seharusnya memberikan bantuan kepada meraka yang kurang beruntung, tapi setidaknya ini memberikan bantuan tersendiri bukan kah ini yang dicita-citakan bangsa kita.?

* + 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan Menurut Westra (2014) Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan mengenai pelaksanaan pembelajarannya temukan lebih banyak berbentuk wawancara dengan pihak Penyelenggara dan tutor, ini disebabkan karena pada proses penelitian, pelaksanaan pembelajaran program paket C ini belum berlangsung, prosesnya dilaksanakan pada bulan Januari, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan itu pada bulan september hingga akhir November, namun peneliti tidak dapat dengan betul mempertanggung jawabkan adanya proses pembelajaran walau sebelumnya peneliti pernah melakukan observasi awal pada tahun 2014 lalu dan yang terlihat pada observasi sebelumnya memang warga belajarnya sangat kurang setiap pertemuannya. Sehingga itulah sebabnya peneliti, mengangkat masalah ini untuk peneliti teliti secara mendalam. Tidak adanya proses observasi secara langsung didalam kelas, sehingga pelaksanaan pembelajaran antara tutor, warga belajar, penyelenggara dan program pembelajarannya hanya dapat peneliti peroleh melalui wawancara saja dan ini tidak dapat peneliti pertanggung jawabkan dengan baik.

* + 1. Evaluasi

Sudjana (2008:6) mengemukakan bahwa evaluasi adalah Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data untuk memasukkan dalam pengambilan keputusan mengenai program yang sedang dan/atau telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan mengenai hasil pembelajaran pada warga belajar, karena peneliti tidak melakukan observasi secara langsung jadi pada bagian penilaian pun peneliti hanya melakukan proses wawancara saja dengan dokumentasi daftar nilai hasil Ujian Nasional pada program paket C sebelumnya yang diberikan oleh penyelenggara dan menurut peneliti pengelola kurang memaksimalkan apa yang menjadi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa program paket C yang tujuannya menyetarai SMA dalam proses dan pelaksanaannya tidak terlaksana dengan baik.

1. **Kendala pelaksanaan program Pendidikan Kesetaraan Paket C**

Terlaksananya program pendidikan kesetaraan paket C di SKB Sidrap berkat adanya berbagai faktor yang mendukung penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket C, yaitu: Antusias masyarakat yang ingin memperoleh ijazah paket C, serta tekad kuat pengelola untuk tetap mengadakan program paket C walaupun tak mendapatkan bantuan pendanaan dari pusat dan Dinas yang bersangkutan. Namun program pendidikan kesetaraan paket C yang dimulai pada tanggal 01 September s.d 30 November 2015 tidak luput dari halangan yang dihadapi dilapangan.

Permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi tersebut dalam proses pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket C di SKB Sidrap, yaitu: pelaksanaan yang hanya berlangsung selama 6 bulan saja karena program ini adalah program kesetaraan paket C swadaya bukan program reguler seperti yang seharusnya dilaksanakan, kemudian paket C swadaya otomatis semua pembiayaan dibebankan kepada warga belajar karena tidak adanya Dana dari pusat dan pihak terkait yang diberikan untuk program ini sehingga pengelola berinisiatif melaksanakan program dengan mempersingkat waktu pembelajaran serta semua fasilitas di biayai oleh warga belajar, dampak selanjutnya dana transportasi yang ditanggung sendiri yang menyebabkan warga belajar malas mengikuti proses pembelajaran, hanya ingin ikut ujian saja dan memeperoleh ijazah. Padahal yang sebenarnya tidak boleh, semunya harus melalui proses apa yang akan mereka jawab pada saat pelaksanaan ujian ketika tidak belajar terlebih dahulu. Kendala selanjutnya Adanya sebagian warga belajar yang harus dibujuk dirumahnya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dampak lainnya adalah adanya warga belajar yang tidak rutin mengikuti pembelajaran, dan warga belajar yang lebih memilih bertani dan mencari nafkah dari pada belajar, alasan menjaga anak dan sebagainya.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Arief Jae (2013) mengemukakan kendala yang dihadapi dalam program pendidikan kesetaraan Paket C kendala yang yang paling sering mempengaruhi kegagalan program pendidikan Kesetaraan Paket C antara lain yang paling signifikan adalah faktor ekonomi. Oleh karena itulah faktor ekonomilah yang lebih mereka perhatikan dari pada pendidikan. Pada saat melaksanakan proses belajar ini juga sarat dengan menghadapi berbagai kendala seperti warga belajar yang bermalas-malasan. Kendala lainya adalah masalah cuaca yang kurang bersahabat. Terutama sekali saat-saat musim penghujan. Pada musim penghujan biasanya warga belajar malas keluar rumah untuk diajak belajar.

Semua dampak ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya akan kembali pada Dana dan keuangan yang justru banyak memunculkan masalah baru, kesadaran warga belajar juga sangat perlu agar keduanya dapat sejalan.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* + - 1. **Kesimpulan**

Hasil penelitian tentang Penyelenggaraan yang Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang dilaksanakan di SKB Kab. Sidrap disimpulkan sebagai berikut:

* + - * 1. Penyelenggaraan Program pendidikan Kesetaraan paket C tidak berjalan dengan baik, indikasinya adalah
	1. Perencanaan yang hanya melibatkan Kepala SKB dan pengelola diputuskan hanya berlangsung selama 6 bulan yang seharusnya dilaksanakan selama 3 tahun, sesuai dengan proses pembelajaran di SLTA. Sehingga semua perencanaan dari mulai warga belajar, sampai dengan hasil belajar direncanakan hanya dilaksanakan selama 6 bulan saja tidak sesuai dengan yang seharusnya.
	2. Pelaksanaan pembelajaran juga tidak berjalan dengan baik, indikasinya adalah warga belajar yang membiayai segala hal, sehingga dana transportasi yang ditanggung sendiri yang menyebabkan warga belajar malas mengikuti proses pembelajaran, hanya ingin ikut ujian saja dan memeperoleh ijazah, Adanya sebagian warga belajar yang harus dibujuk dirumahnya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, dan warga belajar yang lebih memilih bertani dan mencari nafkah dari pada belajar, alasan menjaga anak dan sebagainya.

73

* 1. Penilaian hasil pembelajaran tidak berjalan baik, indikasinya adalah adanya warga belajar yang indeks kehadirannya tidak mencapai 100% sehingga hasil belajarnya yang terlihat pada ujian semester masih kurang, begitupun pada ujian nasional.
		+ - 1. Kendala yang ditimbulkan yang paling utama dikarenakan Penyelenggaraannya yang swadaya, sehingga segala sesuatunya dibebankan kepada warga belajar sehingga menyebabkan berbagai macam masalah lain.
			1. **Saran**

Mengacu pada kesimpulan penelitian diatas, maka saran kepada:

1. Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan agar berupaya menyediakan pendanaan yang memadai untuk warga belajar, karena pelaksanaan program ini selama 3 tahun lamanya. Otomatis akan ada kebosanan tersendiri selama kurun waktu tersebut apa lagi dengan tidak adanya anggaran sama sekali. Pendidikan Non Formal seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah, mengingat masih banyaknya warga yang belum dan tidak bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk bersekolah. Sehingga wadah ini dapat menjadi penolong bagi mereka untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan yang sama layaknya sekolah Formal lainnya.
2. Tokoh masyarakat hendaknya berperan aktif memotifasi warganya yang belum memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan orang lain rasakan untuk mengikuti pendidikan kesetaraan paket C dalam peningkatan taraf hidup Masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah Sinring, Ali Latif Amri, Pattaufi, Rudi Amir. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi Program S1 Fakultas Ilmu Pendidikan UNM*. Makassar. Budi Utama Prima

Abdulhak, Ishak, dkk. 2012. *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Nonformal*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Aoer, Cyprianus. 2005. *Masa Depan Pendidikan Nasional,* Jakarta: Center For poverty studies.

Arikunto, suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dirjen PLS, Depdiknas 2003. *Pedoman bagi penyelenggara program paket C*. Jakarta.

Dirjen Pendidikan nonformal dan informal. 2007. *Acuan proses pelaksanaan dan pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C.* Jakarta.

Dirjen Pendidikan nonformal dan informal. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Program Paket C Umum.* Jakarta.

Donsantosa. 2009. *Blogspot.com.googleweblight.com/lite\_url http:/kmp-atrikel-ekonomi.blogspot 2009/07.* 22 Desember 2015.

Friendly. 2009.*Penelitian Study Kasus.* penelitianstudikasus.blogsot.com/2009/03/ pengertian-penelitian-studi-kasus.html?m=1. 05 Mei 2015.

Fuad, Nurhattati. 2014. *Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat Konsep dan Strategi Implementasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hunger JD & Wheelen TL. 2003. *Manajemen Strategis.* Terjemahan Julianto Agung S- ED II. Yogyakarta. Andi

Ishak Abdulhak & Ugi Suprayogi. (2012). *Penelitian Tindakan dalam Pendidikan Nonformal.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kementerian Pendidikan Nasional. (2010) .*Pedoman Penyelenggaraan Program Paket C Umum.* Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

Mendikbud. (2013). *Tingginya* *Angka Putus Sekolah di Indonesia.* Diakses (http://edukasi.kompasiana.com/2013/12/24/tingginya-angka putussekolah-di-indonesia-622368.html) Diakses pada tanggal 24 September 2014 pada pukul 12.15 WIB

Menteri Pendidikan Nasional. (2008). *Standar Proses Pendidikan Kesetaraan, Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Mulyono MA. (2009).

Joesoef, Soelaiman, dkk. 1981. *Pendidikan Luar Sekolah,* Surabaya : Usaha Nasional.

Kamil, Mustofa. 2009. *Pendidikan Nonformal pengembangan melalui PKBM di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

*Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 132/U/2004 tentang program paket C. 2006*. Jakarta: CV. Tamita Utama.

………, 1983. *Manual Supervisi, Pelaporan, Evaluasi, Monitoring Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.* Balai Pendidikan Masyarakat.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

*Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan baik jalur pendidikan formal*. Jakarta.

Setiawan Ebta, 2012-2015. *WWW.KBBI.WED.ID /pengertian /kendala*. Kemendikbud (Pusat Bahasa)*.* 22 Desember 2015.

Sinring, Abdullah dkk. 2012. *Pedoman penulisan skripsi Program S1.* Fakultas Ilmu Pendidikan UNM.

Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk pendidikan Nonformal dan pengembangan Sumber daya manusia.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sukarna, 2011. *Dasar-dasar Manajemen. Bandung. Sumbersari Indah.*

Tayibnapis F.Y, 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi.* Jakarta. PT. Asdi Mahasatya.

Tirtarahardja, Umar, dkk. 2005. *Pengantar Pendidikan.* Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

2003. *http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf* diakses pada tanggal 26 September 2014 pukul 08.42 WITA.

*http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html* diakses pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 21.29 WITA

*http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29153/Chapter%20II.pdf;jsessionid4C5DE2FA79685E9EDC2EB9BAD1DFC488=?sequence=3* diakses pada tanggal 07 April 2015 pukul 22.04 WITA.

Undang-undang Dasar 1945. *Tentang system Pendidikan Nasional.* Yogyakarta. Pustaka Widyatama.

Undang-undang RI No.20 tahun2003. *Tentang sistem Pendidikan Nasional.* Yogyakarta. Pustaka Widyatama.

Sihombing, Umberto.1999. *Pendidikan Luar Sekolah: Kini dan Masa Depan*. Jakarta: Mahkota.